



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 4153-4161

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengelolaan Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Parepare

Arfianty¹, Rika Rahma², Irwan Idrus³, Imran Rosadi⁴, Reski Amalia B⁵

Program Studi Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

E-mail: arfiantvarfan@gmail.com¹, rhykaaein18@gmail.com², idrusiwan@yahoo.com³,
imranrosadi080273@gmail.com⁴, amalioreski347@gmail.com⁵

Abstrak

Pendidikan memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan keberhasilan pendidikan tidak lepas dari pengelolaan sekolah yang efektif, terutama dalam manajemen keuangan. Pengelolaan dana sekolah yang terencana dan sistematis tidak hanya menjamin kelancaran operasional, tetapi juga menjadi faktor utama dalam pemenuhan fasilitas pembelajaran yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Parepare berkontribusi terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah manajemen keuangan sekolah, sedangkan variabel terikatnya adalah fasilitas pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang baik mampu mendukung penyediaan fasilitas pembelajaran yang berkualitas, mulai dari sarana-prasarana hingga kebutuhan pendukung kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan ini dilakukan melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah bukan hanya menjadi alat administratif, tetapi juga berperan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan dan tercapainya visi-misi sekolah secara optimal.

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Fasilitas Pembelajaran, Sekolah Dasar

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas bangsa. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan dana serta bagaimana dana tersebut dikelola. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah memegang peran strategis sebagai manajer keuangan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pengelolaan dana harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi [1]. Namun, apabila pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan dengan baik, besarnya dana yang tersedia tetap berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan [2].

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa manajemen keuangan sekolah yang baik berkontribusi nyata terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran. Ramadhani dan Suparno (2020) menegaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang terencana mampu mendukung ketersediaan sarana pembelajaran yang lebih lengkap di sekolah dasar[3]. Penelitian lain oleh Pusvitasari dan Sukur (2020) menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam memastikan pemasukan dan pengeluaran berjalan sesuai kebutuhan sekolah[4]. Sementara itu, Bahri (2021) melalui penerapan Zachman Framework dalam perancangan sistem informasi keuangan membuktikan bahwa integrasi berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pendidikan[5]. Handoko (2022) menambahkan bahwa keberhasilan manajemen keuangan sekolah sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban[6].

Meskipun literatur menunjukkan pentingnya manajemen keuangan, praktik di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan. Banyak sekolah swasta menghadapi keterbatasan pendanaan karena sebagian besar hanya

mengandalkan biaya pendidikan dari orang tua siswa, sementara dukungan dari yayasan sangat terbatas. Kondisi ini sering menimbulkan masalah dalam menjaga arus kas sekolah, keterlambatan pembayaran tenaga pendidik, serta kesulitan melakukan investasi jangka panjang untuk sarana pembelajaran berbasis teknologi. Situasi tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian antara prinsip ideal manajemen keuangan dengan realitas pengelolaan di sekolah swasta [7].

SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Parepare merupakan salah satu sekolah yang menghadapi tantangan tersebut. Dengan visi pendidikan berbasis teknologi informasi dan nilai keislaman, sekolah ini dituntut menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, namun hanya memiliki dua sumber utama pendanaan, yaitu dari biaya siswa dan dukungan yayasan. Keterbatasan ini menjadi hambatan bagi sekolah dalam mengembangkan infrastruktur pendidikan, sarana digital, serta pemenuhan kebutuhan operasional yang terus meningkat. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti manajemen keuangan di sekolah negeri atau sekolah dengan dukungan dana pemerintah [8][9], sehingga kajian pada sekolah swasta berbasis yayasan seperti SDIT Muhammadiyah masih jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dengan menganalisis manajemen keuangan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Parepare serta perannya dalam peningkatan fasilitas pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan utama: Bagaimana manajemen keuangan sekolah dapat meningkatkan fasilitas pembelajaran di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Parepare? Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi praktis bagi sekolah dalam memperbaiki tata kelola keuangan, tetapi juga menjadi dasar pengembangan strategi manajemen pendidikan di sekolah swasta berbasis yayasan keagamaan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yakni metode yang berupaya memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna di balik interaksi sosial dan dinamika lapangan. Menurut Sugiyono (2016), metode kualitatif berlandaskan post-positivisme dengan peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, serta analisis lebih menekankan makna daripada generalisasi [10].

Lokasi penelitian ditetapkan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, Jalan Bukit Madani, Lapadde, Kota Parepare. Pelaksanaannya berlangsung selama dua bulan, mulai 5 Juni hingga 5 Agustus 2024, yang mencakup tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data.

Informasi dikumpulkan dari tiga narasumber utama yang dipilih secara purposif, yaitu kepala sekolah, bendahara, dan seorang guru. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung serta kapasitas mereka dalam pengelolaan keuangan sekolah, sehingga data yang diberikan relevan dengan fokus penelitian [10][11]

Dua konsep utama menjadi fokus operasional. Pertama, pengelolaan keuangan dimaknai sebagai rangkaian kegiatan memperoleh, mengatur, dan menggunakan dana secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan lembaga, dengan indikator perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban [12]. Kedua, fasilitas pembelajaran dipahami sebagai seluruh sarana yang mendukung proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, agar tujuan pendidikan dapat tercapai optimal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mendalam. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah literatur relevan yang memperkuat landasan teori. Observasi memberikan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan, sedangkan dokumentasi meliputi pengumpulan arsip, laporan, dan catatan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Seluruh teknik tersebut dijalankan dengan peneliti sebagai human instrument yang menentukan fokus, memilih sumber, menilai kualitas data, hingga menarik kesimpulan.

Data yang digunakan terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat memperkaya dan memperkuat temuan lapangan.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Burhan Bungin (2011) yang terdiri dari tiga tahap. Reduksi data merupakan langkah awal dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang diperoleh Selanjutnya, display data dilakukan dengan menyajikan informasi dalam bentuk narasi sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan [11]. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses analisis berulang yang

memastikan keakuratan serta konsistensi data. Ketiga tahap tersebut berlangsung secara simultan dan berkesinambungan sejak awal hingga akhir penelitian sehingga hasil yang diperoleh valid dan bermakna.

Sumber	2022		Selisih / sisa	2023		Selisih / sisa
	Pemasukan	Pengeluaran		Pemasukan	Pengeluaran	
DPP,SPP, Iuran	Rp.247.500.000	Rp.226.950.000	Rp.20.550.000	Rp.282.750.000	Rp.272.000.000	Rp.10.750.000
Kegiatan dan Yayasan	Total pengeluaran untuk belanja bahan pembelajaran = Rp. 42.500.000			Total pengeluaran untuk belanja bahan pembelajaran = Rp. 60.000.000		

3. Hasil dan Diskusi

Data Keuangan Sekolah Tahun 2022–2023

Tabel 1. Data Keuangan Sekolah Tahun 2022–2023

Sumber: Data Keuangan Sekolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dana yang diperoleh sekolah dikelola secara optimal untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan keterangan bendahara, sisa dana setiap tahun tidak langsung dihabiskan, melainkan dimasukkan ke dalam saldo kas sekolah. Dana tersebut kemudian dialokasikan kembali pada tahun ajaran berikutnya agar tetap sesuai dengan kebutuhan prioritas dan pertanggungjawaban yang berlaku (Bendahara, 2024).

Jika ditelaah lebih lanjut, pada tahun 2022 sekolah mengalokasikan Rp. 42,5 juta untuk pengadaan bahan pembelajaran, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 60 juta. Pengeluaran ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pembelajaran, serta kebutuhan alat dan bahan ajar yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar.

Penerimaan/Pendapatan Sumber Keuangan

Keberlangsungan kegiatan operasional pendidikan, khususnya pada lembaga swasta, sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam memperoleh serta mengelola sumber keuangan. Hal ini berbeda dengan sekolah negeri yang sebagian besar pendanaannya ditopang langsung oleh pemerintah. Manajemen keuangan menjadi faktor penentu agar operasional dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan [4]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Sulistiyorini mengelompokkan sumber keuangan pendidikan ke dalam tiga kategori, yakni pemerintah pusat maupun daerah, orang tua siswa, serta masyarakat dalam bentuk kontribusi yang mengikat maupun tidak mengikat [13].

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah pada 24 Juni 2024 menunjukkan bahwa sumber keuangan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan terutama berasal dari yayasan yang dikelola melalui LAZISMU serta pembayaran SPP siswa. LAZISMU sebagai lembaga zakat nasional berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, wakaf, serta dana kederewanan lain dari perseorangan, lembaga, perusahaan, maupun instansi. Dana yang disalurkan LAZISMU kepada sekolah digunakan untuk mendukung operasional pendidikan sekaligus memberikan bantuan beasiswa bagi siswa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa karena sekolah merupakan binaan Muhammadiyah, maka dana donatur yang dihimpun LAZISMU menjadi bagian penting dari keuangan sekolah. Beberapa program LAZISMU yang difokuskan pada bidang pendidikan di antaranya Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Lazismu Goes To Campus, Peduli Guru, MSPP, Edutab-mu, Save Our School, serta bantuan langsung kepada orang tua siswa.

Selain bantuan dari yayasan, sumber keuangan sekolah juga berasal dari pembayaran SPP siswa yang ditetapkan dengan sistem subsidi silang. Mekanisme ini membuat besaran biaya yang dibayarkan siswa berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan keterangan bendahara, skema ini diberlakukan agar semua siswa tetap dapat mengakses pendidikan meskipun memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Hingga tahun 2022 dan 2023, sekolah masih mengandalkan dana dari yayasan dan SPP siswa sebagai dua sumber utama. Baru pada tahun 2024 upaya untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diusahakan, meskipun sebelumnya sekolah belum memperoleh bantuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dukungan dana dari pemerintah.

Tantangan lain dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah keterlambatan pembayaran SPP dari sebagian orang tua siswa. Situasi ini dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan kondisi ekonomi keluarga yang tidak selalu

stabil, sehingga pihak sekolah tidak dapat bersikap terlalu menuntut dalam penagihan (Bendahara, 2024). Dalam kondisi demikian, kemampuan manajemen sekolah menjadi sangat penting, khususnya dalam merancang strategi keberlanjutan pendanaan. Kepala sekolah dituntut mampu menggali sumber-sumber pembiayaan baru serta memanfaatkan dana yang tersedia secara efektif. Seperti yang dijelaskan Fitrianti (2023), kepala sekolah bersama stakeholder perlu melakukan perencanaan dan prediksi yang matang dalam menentukan target dan tujuan pendidikan. Salah satu strategi yang relevan adalah pengembangan usaha koperasi sekolah. Melalui kompetensi kewirausahaan, kepala sekolah memiliki peluang untuk memperluas sumber pendanaan, sehingga lembaga pendidikan tetap mampu bertahan di tengah tantangan yang terus berkembang [9].

Perencanaan Keuangan

Perencanaan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam manajemen sekolah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan pendidikan. Proses ini harus melibatkan seluruh pihak terkait agar penyusunan program kegiatan operasional sekolah untuk satu tahun dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang ada. Pertimbangan keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan suatu program, sebab pelaksanaan kegiatan sekolah tidak terlepas dari ketersediaan dana yang dimiliki [13].

Dalam praktiknya, penganggaran terhadap sarana, prasarana, serta kebutuhan lain yang menunjang proses pembelajaran memiliki peran vital dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Anggaran tidak hanya dipahami sebagai rencana keuangan, tetapi juga dapat berupa rencana non-keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional sekolah. Dengan demikian, penganggaran merupakan bagian integral dari perencanaan karena berfungsi menyediakan dana maupun dukungan lain yang diperlukan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Pandangan mengenai pentingnya perencanaan juga ditegaskan oleh Terry dalam Syarifudin (2005) yang menyatakan bahwa perencanaan berarti menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus melibatkan pengambilan keputusan dengan memilih alternatif terbaik. Sejalan dengan itu, Mulyasa (2005) menekankan bahwa perencanaan keuangan atau budgeting adalah upaya mengoordinasikan seluruh sumber daya yang ada untuk meraih sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menimbulkan dampak negatif.

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah mengungkapkan bahwa setiap tahun SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan menyelenggarakan Rapat Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rapat ini melibatkan yayasan, kepala sekolah, para guru, bendahara, serta komite sekolah. Komite sekolah turut dilibatkan mengingat sekolah belum memperoleh dana BOS, sehingga dukungan dari komite menjadi penting dalam menyusun strategi pendanaan. Bendahara menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat tiga komponen utama yang berperan dalam penyusunan RKAS, yakni yayasan, pihak sekolah, dan komite sekolah [14].

Selain itu, sekolah juga rutin mengadakan rapat dengan orang tua siswa, biasanya dilakukan dua kali dalam satu semester, yakni pada rapat tengah semester dan rapat kenaikan kelas. Dalam forum tersebut, pembahasan mengenai anggaran sekolah selalu menjadi salah satu agenda penting. Transparansi keuangan menjadi perhatian utama, di mana seluruh anggaran masuk dan keluar disampaikan kepada orang tua siswa meskipun terdapat keterbatasan regulasi yang harus dipatuhi (Bendahara, 2024).

Upaya transparansi ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menjaga kepercayaan publik. Melalui rapat yang melibatkan yayasan, orang tua, dan komite, sekolah tidak hanya melaporkan kondisi keuangan, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan masukan dari berbagai pihak. Dengan demikian, perencanaan keuangan tidak hanya menjadi mekanisme administratif, melainkan juga sarana untuk membangun kolaborasi yang memperkuat keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Model Sistem Tata Kelola Keuangan pada SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Kota Parepare

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen, penerapan manajemen keuangan pendidikan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Kota Parepare mencakup beberapa aspek penting, yakni perencanaan keuangan, penerimaan atau pendapatan sumber keuangan, penggunaan dana, pengawasan dan evaluasi, pertanggungjawaban, hingga sistem pembayaran SPP siswa dan alur penggunaan anggaran.

a. Penggunaan Dana Sekolah

Dana sekolah digunakan untuk membiayai program-program operasional sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana. Dana yang terkumpul dibukukan, diagendakan, dan kemudian dialokasikan untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Dalam pengelolaannya, pihak sekolah menerapkan prinsip manajemen keuangan yang menekankan efisiensi, hemat, serta penggunaan sesuai rencana yang telah disepakati [15].

Seperti dijelaskan oleh Widjanarko dan Suhertian (1997, dalam Huriyah, 2023), staf pengelola keuangan sekolah harus memahami tugas-tugas pokok, mulai dari pembukuan, ketaatan pada regulasi, dedikasi terhadap pimpinan, hingga sikap tanggap terhadap tanggung jawab karena kelalaian dapat menghambat pencapaian tujuan sekolah. Hasil wawancara dengan bendahara sekolah menegaskan bahwa penggunaan anggaran tetap berlandaskan pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun setiap pergantian semester.

Bentuk pengeluaran meliputi pengembangan buku perpustakaan, belanja barang habis pakai, pengadaan LCD, pembangunan gedung baru, perawatan sarana prasarana, pembangunan lahan parkir, serta perbaikan fasilitas sekolah seperti atap, AC, kipas angin, dan jaringan WiFi. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, tercatat bahwa sekolah mengalokasikan Rp60 juta untuk kebutuhan bahan pembelajaran, termasuk sarana, fasilitas, serta alat pembelajaran.

b. Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran

Pengawasan anggaran dilakukan secara sistematis melalui kegiatan monitoring, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan agar penggunaan dana sesuai rencana dan berjalan efektif serta efisien. Kepala sekolah berperan sebagai manajer yang memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan, melakukan koordinasi, mencegah pemborosan, dan menjaga kepercayaan masyarakat (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Proses pengawasan dilakukan melalui beberapa langkah: (1) pengembangan standar sebagai acuan, (2) pengukuran pelaksanaan melalui pengumpulan informasi, (3) penilaian adanya penyimpangan, dan (4) perbaikan melalui penyesuaian (Fitrianti, 2023). Berdasarkan wawancara, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pihak internal (kepala sekolah) serta pihak eksternal seperti yayasan, LAZISMU, komite sekolah, dan wali murid (Kepala Sekolah, 2024). Selain itu, terdapat Lembaga Pengawas dan Pemeriksa Keuangan (LPPK) yang secara khusus mendampingi sekolah, termasuk memberikan edukasi pencatatan keuangan berbasis akuntansi. Dengan demikian, evaluasi penggunaan anggaran dilakukan secara dua arah, yaitu internal dan eksternal, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

c. Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Sekolah

Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang disusun oleh bendahara bersama staf sekolah. Laporan tersebut berisi pemasukan, pengeluaran, dan alokasi dana. Keuangan sekolah memiliki peran vital, karena semakin baik kondisi keuangan, semakin besar pula kemampuan sekolah dalam mendanai program pembelajaran [13].

Guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban dituangkan dalam dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) tahunan yang diserahkan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada Dikdasmen. Selain itu, laporan juga disampaikan kepada komite sekolah sebagai wujud transparansi (Septiasari, 2024; Kepala Sekolah, 2024). Dikdasmen sebagai lembaga Muhammadiyah yang menaungi pendidikan dasar dan menengah turut melakukan audit serta evaluasi agar pengelolaan keuangan tetap sesuai standar.

d. Metode Pembayaran SPP Siswa

Berdasarkan wawancara dengan bendahara sekolah, sekitar 80% orang tua siswa membayar SPP melalui sistem online atau transfer bank, sedangkan sisanya menggunakan pembayaran tunai di sekolah. Peralihan ke sistem non-tunai ini menunjukkan adaptasi yang positif sekaligus mengurangi risiko peredaran uang palsu yang sempat marak di Sulawesi Selatan.

e. Alur Penggunaan Anggaran

Dalam praktiknya, setiap pengeluaran anggaran harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Hal ini menjadi mekanisme kontrol agar kepala sekolah mengetahui setiap transaksi serta memastikan penggunaan dana sesuai aturan dan kebutuhan sekolah.

Secara keseluruhan, tata kelola keuangan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, hingga evaluasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di sekolah.

Hubungan manajemen keuangan dengan mutu Pendidikan

Hubungan antara manajemen keuangan dengan mutu pendidikan sangat erat karena biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa adanya biaya yang memadai, proses pembelajaran tidak dapat berjalan optimal. Oleh sebab itu, pembiayaan pendidikan menjadi aspek krusial yang

harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan (Nafisah et al., 2017). Sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus disusun dengan merujuk pada peraturan pemerintah pusat maupun daerah, dilaksanakan secara transparan, efisien, akuntabel, serta wajib dipertanggungjawabkan melalui pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.

Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Jones (1985), perencanaan keuangan atau *financial planning* identik dengan penyusunan anggaran yang bertujuan mengkoordinasikan seluruh sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa menimbulkan dampak negatif (Widodo et al., 2023). Tahap pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk penganggaran yang dapat mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan telah terlaksana. Dalam praktiknya, manajemen keuangan melibatkan berbagai komponen penting, seperti prosedur anggaran, akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, distribusi, investasi, serta pemeriksaan (ADIB, 2020b).

Keterkaitan antara keuangan dengan mutu pendidikan tampak jelas karena pembiayaan harus disesuaikan dengan standar kualitas tertentu. Meski demikian, biaya bukanlah satu-satunya faktor penentu, tetapi berfungsi sebagai prasyarat agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik (Bobi, 2018). Karena itu, efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana mutlak diperlukan. Tanpa kedua hal tersebut, seberapa besar pun dana yang dialokasikan tidak akan mampu meningkatkan mutu pendidikan (Suhaimi, 2021). Lebih jauh, upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek teknis, melainkan juga menyangkut perencanaan, pendanaan, serta efektivitas manajemen sekolah secara menyeluruh (Rahmah, 2016).

Penelitian Balitbang Dikbud juga menegaskan bahwa manajemen sekolah, termasuk pengelolaan keuangan, merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya, khususnya dana pendidikan, harus dilakukan secara profesional (Sa'adah & Budi, 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan kepala sekolah SDIT KH. Ahmad Dahlan yang menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari biaya, meskipun realitasnya sekolah masih bergantung pada SPP siswa dan dana yayasan. Upaya sedang dilakukan agar sekolah dapat memperoleh dana BOS (Kepala Sekolah, 2024). Wawancara dengan guru juga menunjukkan bahwa keterbatasan dana berdampak langsung pada stabilitas kegiatan pembelajaran, terutama aktivitas luar kelas yang membutuhkan dukungan finansial, misalnya untuk transportasi dan konsumsi (Septiasari, 2024).

Sejumlah penelitian turut menguatkan temuan tersebut. Rosadi (2024) menemukan bahwa perilaku keuangan manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanganan risiko kerugian pada perusahaan air minum Tirta Karajae Kota Parepare melalui mediasi pemahaman tentang *risk management*. Penelitian lainnya oleh Rosadi (2023) terkait pengelolaan dana BOS di SDN 187 Dante Malua juga menunjukkan bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana BOS telah dilaksanakan cukup baik sesuai kebutuhan sekolah dan aturan teknis yang berlaku. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan yang baik sangat menentukan kualitas pendidikan. Efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana merupakan syarat utama, sementara profesionalitas dalam mengelola sumber daya pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.

Analisis Perencanaan Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran

Analisis perencanaan keuangan sekolah dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan dilakukan melalui tahapan yang sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, seperti yayasan, kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah. Pada awal tahun ajaran baru, perencanaan anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kemudian dikelola lebih lanjut melalui Rencana Anggaran Pelaksanaan Belanja Sekolah (RAPBS). Seluruh perencanaan ini disusun melalui rapat bersama dan dipastikan sesuai dengan aturan penggunaan dana serta larangannya. Berdasarkan hasil evaluasi, anggaran yang diterima dapat terserap hingga 100%, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program sekolah secara optimal.

Sejalan dengan pendapat Lipham (1985), proses penyusunan anggaran terdiri dari empat tahapan utama, yaitu perencanaan, persiapan, pengelolaan pelaksanaan, serta penilaian anggaran. Keempat tahapan tersebut terbukti relevan dengan praktik yang diterapkan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan (Sinurat, 2019). Senada dengan itu, Bastian (2020) menegaskan bahwa penyusunan perencanaan keuangan pendidikan harus memperhatikan perkiraan biaya dan kebutuhan keuangan dalam pelaksanaan program. Setiap kegiatan dan tugas yang memiliki implikasi finansial harus diidentifikasi dan dihitung secara cermat, sehingga anggaran yang disusun dapat mencukupi kebutuhan pendidikan.

Dengan adanya perencanaan keuangan yang matang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kegiatan operasional pendidikan. RKAS berfungsi sebagai dasar bagi pelaksanaan program-program sekolah selama satu tahun, baik untuk mendukung pengembangan sekolah maupun peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip manajemen keuangan yang baik (Bastian, 2020).

Selain itu, mekanisme pengelolaan biaya di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan dilaksanakan melalui RAPBM, dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang rapi. Evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga (Firman, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan sekolah dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, berlandaskan RKAS, serta digunakan secara efektif untuk menunjang proses pendidikan. Hal ini membuat dana yang diterima sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan (Sinurat, 2019; Firman, 2022).

Analisis Pelaksanaan Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran

Pelaksanaan manajemen keuangan sekolah merupakan tahap penting setelah proses perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pada tahap ini, kegiatan terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana. Mekanisme penerimaan dilakukan dengan penyaluran dana dari yayasan kepada sekolah setelah RKAS disetujui oleh komite sekolah. Proses pencairan dana dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah, dengan syarat penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Dana yang diperoleh kemudian dibelanjakan untuk barang dan jasa dalam rangka menunjang operasional sekolah sesuai aturan teknis yang berlaku. Khusus untuk pengeluaran dengan nilai yang relatif besar, sekolah menerapkan prinsip efisiensi dengan membandingkan harga dari minimal tiga penyedia agar terhindar dari pemborosan. Strategi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai bagi peserta didik.

Mulyasa (2006) menegaskan bahwa pelaksanaan keuangan sekolah pada dasarnya terbagi atas penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dana dari berbagai sumber harus dibukukan sesuai prosedur yang berlaku, sedangkan pengeluaran dana harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan yang telah direncanakan. Temuan di lapangan mendukung pernyataan tersebut, karena praktik manajemen keuangan di sekolah ini memang berjalan dalam kerangka penerimaan dan pengeluaran yang selaras dengan prinsip akuntabilitas (Ali Muhksin & Baidi, 2023).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi Arfianty (2023) yang menyoroti pengaruh pengetahuan manajemen keuangan terhadap intensi berwirausaha. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan manajemen keuangan berpengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap kemampuan mengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dalam mengelola dana menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu lembaga, termasuk sekolah. Penelitian lain oleh Rika (2023) tentang kinerja keuangan pemerintah desa juga menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mampu merealisasikan anggaran secara optimal, sebagaimana tercermin pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Manajemen keuangan sekolah yang tertata dengan baik terbukti mampu memberikan dampak nyata pada peningkatan proses pembelajaran. Menurut Saputra et al. (2023), keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh integrasi berbagai komponen seperti guru, siswa, kurikulum, peralatan, serta dana yang tersedia. Dengan pengelolaan keuangan yang terencana, semua komponen tersebut dapat berjalan selaras sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi, dan memberdayakan peserta didik secara maksimal. Senada dengan itu, Hanifah dan Suhana (2009) menekankan bahwa pembelajaran hanya dapat mencapai hasil optimal apabila ditopang oleh biaya yang memadai, karena keberadaan dana memungkinkan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran.

Pengelolaan dana sekolah juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Bab IV Pasal 19 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pengawasan proses pembelajaran agar tercapai hasil yang efektif dan efisien (RI, 2014). Hal ini memperkuat bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan instrumen penting dalam pencapaian mutu pendidikan.

Temuan penelitian ini turut didukung oleh studi Idrus (2024) yang menganalisis pengelolaan kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Temmassarangge, Pinrang. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan Non-Performing Loan (NPL) di unit tersebut sudah efektif, terbukti dengan persentase NPL yang konsisten berada

di bawah 5% selama periode 2020–2022. Efektivitas dalam pengelolaan dana tersebut dapat menjadi analogi bahwa disiplin dan strategi yang baik dalam pengelolaan keuangan mampu meningkatkan kinerja lembaga, termasuk sekolah.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen keuangan di SDIT KH. Ahmad Dahlan berjalan sesuai perencanaan dan berhasil mendukung peningkatan fasilitas pembelajaran. Dana yang diterima dan dikeluarkan dikelola secara transparan, akuntabel, serta diarahkan sepenuhnya untuk menunjang mutu pendidikan. Dengan demikian, keuangan sekolah memainkan peran vital dalam menjamin tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas pembelajaran yang layak bagi peserta didik.

Analisis Audit dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran

Tahap selanjutnya setelah perencanaan dan pelaksanaan adalah evaluasi manajemen keuangan sekolah dalam rangka meningkatkan fasilitas pembelajaran. Evaluasi ini dilaksanakan melalui audit dan pertanggungjawaban keuangan, yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak internal yang diwakili oleh kepala sekolah, serta pihak eksternal yang melibatkan komite sekolah dan yayasan. Audit keuangan pada dasarnya merupakan proses pengawasan sekaligus bentuk evaluasi objektif terhadap seluruh aktivitas transaksi keuangan dan pelaksanaan program sekolah. Kepala sekolah maupun tim auditor sekolah biasanya melaksanakan audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap sistem akuntansi, menelaah buku keuangan yang telah disusun, serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas (Bobi, 2018).

Dalam konteks pelaporan keuangan sekolah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi dokumen utama yang harus memuat rencana penerimaan dan penggunaan dana dari berbagai sumber yang diterima sekolah. Dokumen ini wajib ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, serta ketua yayasan penyelenggara pendidikan agar sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan sekolah tidak hanya menjadi ranah internal, tetapi juga harus melibatkan pihak eksternal sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan keuangan (Adib, 2020).

Pelaksanaan evaluasi keuangan di SDIT KH. Ahmad Dahlan telah berjalan sesuai dengan ketentuan teknis dan praktik lapangan. Setiap bulan, pihak sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan bukti kuitansi untuk memastikan keabsahan penggunaan dana. Prosedur ini memperlihatkan adanya sistem yang tertib dan transparan dalam manajemen keuangan sekolah, sehingga pemanfaatan dana dapat benar-benar diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Secara umum, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah di SDIT KH. Ahmad Dahlan terlaksana sesuai prosedur. Setelah RKAS diserahkan di awal tahun, sekolah kemudian secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada komite sekolah. Keberadaan sistem manajemen keuangan yang akuntabel ini terbukti sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dana yang dikelola dengan baik memungkinkan sekolah untuk meningkatkan prestasi peserta didik serta mutu pendidikan, baik pada aspek akademik maupun nonakademik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan terbukti berjalan dengan sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan yang menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan ini berdampak langsung pada peningkatan fasilitas sekolah, baik sarana maupun prasarana, yang kemudian mendorong peningkatan mutu proses pembelajaran. Laporan keuangan tahunan memperlihatkan adanya alokasi dana yang cukup besar untuk kebutuhan fasilitas, menunjukkan bahwa keuangan sekolah mampu dikelola dengan baik guna mendukung tujuan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen keuangan yang tertata dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif serta meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar. Agar pengelolaan keuangan dapat semakin optimal, sekolah diharapkan mampu memperluas dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun sumber pendanaan lain yang sah, sehingga keberlangsungan pengelolaan tidak hanya bertumpu pada biaya operasional sekolah. Kepala sekolah bersama bendahara juga perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran agar pemanfaatan fasilitas pembelajaran lebih efektif. Strategi inovatif seperti pengembangan unit usaha sekolah dapat dipertimbangkan untuk menambah pendapatan mandiri. Selain itu, siswa diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan prestasi, sedangkan orang tua diharapkan konsisten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu agar kelancaran keuangan sekolah tetap terjaga. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis perbandingan pengelolaan keuangan di sekolah lain sebagai bahan evaluasi dan pengembangan model manajemen keuangan pendidikan yang lebih komprehensif.

Referensi

- [1] R. Hidayat, "Pentingnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Pada Sekolah." Universitas Negeri Padang, 2022.
- [2] D. H. Nugraha, "Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh Yogyakarta," *SALIHA J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 221–232, 2022, doi: 10.54396/saliha.v5i2.365.
- [3] L. Ramadhani and S. Suparno, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 5, no. 3, pp. 400–411, 2020, doi: 10.24815/jimeka.v5i3.16047.
- [4] R. Pusvitasari and M. Sukur, "Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan," *AL-TANZIM J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 94–106, 2020, doi: 10.33650/al-tanzim.v4i1.959.
- [5] S. Bahri, "Penerapan Zachman Framework dalam Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah," *J. Tekno Kompak*, vol. 15, no. 1, p. 55, 2021, doi: 10.33365/jtk.v15i1.912.
- [6] C. Handoko, "Manajemen Kepala Sekolah/Madrasah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan," *J. AN-NUR Kaji. Ilmu-Ilmu Pendidik. dan Keislam.*, vol. 8, no. 01, 2022.
- [7] A. Muhksin and Baidi, "Manajemen Administrasi dan Keuangan: Memanajemen Lembaga Madrasah dan Pesantren," *AL-KAINAH J. Islam. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 119–130, 2023, doi: 10.69698/jis.v2i2.479.
- [8] T. Widodo, I. Muhammad, R. Darmayanti, N. Nursaid, and D. A. L. Amany, "Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Digital: Sebuah Kajian Pustaka," *Indones. J. Educ. Manag. Leadersh.*, vol. 1, no. 2, pp. 146–167, 2023, doi: 10.51214/ijemal.v1i2.548.
- [9] L. Fitrianti, "Analisis Manajemen Keuangan Pendidikan Sekolah Negeri dan Swasta," *Al-Ihda' J. Pendidik. dan Pemikir.*, vol. 18, no. 2, pp. 1034–1050, 2023, doi: 10.55558/alihda.v18i2.89.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [11] S. M. S. Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, "Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Cv." Eureka Media Aksara, 2021.
- [12] S. Karyatun, "Mengelola Keuangan Sekolah," *Ilmu dan Budaya*, vol. 40, no. 54, 2016.
- [13] N. Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan," *Al-Afkar Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 67–94, 2018.
- [14] N. Rahmah, "Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah," *Kelola J. Islam. Educ. Manag.*, vol. 1, no. 1, pp. 73–77, 2016, doi: 10.24256/kelola.v1i1.430.
- [15] S. Agustina, *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.